

## Penguatan Literasi Antikorupsi Bagi Siswa Sekolah Dasar di Kampung Ivimahad Kabupaten Merauke

Andri Irawan<sup>1\*</sup>, Farida Romaito Pohan<sup>2</sup>, Nur Rohmah Yulia Ningrum<sup>3</sup>,  
Juventus Bangkit Wibowo<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Pembangunan Sosial, Universitas Musamus

<sup>2,3,4</sup> Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Karya Dharma Merauke

\*Email: [andrirawan@unmus.ac.id](mailto:andrirawan@unmus.ac.id)

### Abstract

*The increasingly widespread phenomenon of corruption in Indonesia demands preventive measures through anti-corruption education from an early age. This community service activity aims to strengthen anti-corruption literacy among students at YPPK Salor Elementary School, Ivimahad Village, Merauke Regency. The implementation method included initial observation, outreach, education, video screenings, discussions, and participatory simulation games. The activity was conducted over one full day with 35 participants from grades 5 and 6. The results of the activity showed a significant increase in students' understanding of the definition, forms, and impacts of corruption, both in the context of everyday life and educational environments. Students were able to identify simple corrupt behaviors such as cheating, cutting in line, and concealing mistakes, and reflected on their personal commitment to honest and responsible behavior. This activity has proven effective in fostering moral knowing, moral feeling, and moral action as the foundation for building a character with integrity. Thus, anti-corruption education at the elementary school level is a crucial strategy in developing a value-conscious young generation and contributing to the creation of an anti-corruption culture.*

**Keywords:** anti-corruption literacy; elementary school students; community service; character education.

### Abstrak

*Fenomena korupsi di Indonesia yang semakin meluas menuntut adanya upaya preventif melalui pendidikan antikorupsi sejak usia dini. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat literasi antikorupsi pada siswa Sekolah Dasar YPPK Salor, Kampung Ivimahad, Kabupaten Merauke. Metode pelaksanaan meliputi observasi awal, sosialisasi, edukasi, pemutaran video, diskusi, serta permainan simulasi yang dirancang secara partisipatif. Kegiatan dilaksanakan selama satu hari penuh dengan pesertaseluruh siswa kelas 5 dan 6 sebanyak 35 Orang. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman siswa terkait definisi, bentuk, dan dampak korupsi, baik dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun lingkungan pendidikan. Siswa mampu mengidentifikasi perilaku koruptif sederhana seperti menyontek, memotong antrian, dan menyembunyikan kesalahan, serta merefleksikan komitmen pribadi untuk berperilaku jujur dan bertanggung jawab. Kegiatan ini terbukti efektif dalam menumbuhkan moral knowing, moral feeling, dan moral action sebagai fondasi pembentukan karakter berintegritas. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi di tingkat sekolah dasar menjadi strategi penting dalam membangun generasi muda yang sadar nilai dan berperan dalam menciptakan budaya antikorupsi.*

**Kata Kunci:** literasi antikorupsi; siswa sekolah dasar; pengabdian masyarakat; pendidikan karakter.

## **Pendahuluan**

Fenomena korupsi di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, menyentuh berbagai sektor mulai dari pemerintahan, pendidikan, hingga layanan publik. Data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa praktik korupsi tidak hanya terjadi pada level elit, tetapi juga sudah merambah ke tingkatan yang lebih rendah, bahkan menjadi semacam budaya yang dianggap lumrah oleh sebagian masyarakat.

Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 terjadi 791 kasus korupsi dengan 1.695 tersangka, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat 579 kasus dengan 1.396 tersangka. Peningkatan ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di tingkat atas, tetapi telah menyebar luas hingga ke berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan.

Lebih lanjut, *Transparency International* melalui Indeks Persepsi Korupsi (IPK : 2023) menempatkan Indonesia pada skor 34 dari 100, dengan peringkat ke-115 dari 180 negara. Skor ini stagnan dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Situasi ini memperkuat urgensi untuk melakukan pendekatan preventif melalui pendidikan, khususnya dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini kepada generasi muda.

Tindakan pencegahan korupsi yang merujuk pada Wijayanto & Zachrie (2009), dapat dilakukan dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai inti korupsi, dengan begitu proses pencegahan ini sangat penting untuk dilakukan dalam mengatasi masalah korupsi. Tindakan pencegahan dan tindakan preventif akan lebih bermanfaat dalam mengatasi permasalahan korupsi daripada dengan melakukan Tindakan sanksi hukum yang tinggi. Tindakan pencegahan korupsi ini dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu; (1) melaksanakan pendidikan antikorupsi; (2) melaksanakan sosialisasi anti korupsi; (3) melaksanakan pengawasan kepada pemerintah.

Pendidikan antikorupsi di tingkat sekolah dasar menjadi strategi penting dalam membentuk karakter siswa yang berintegritas. Literasi antikorupsi bukan hanya mengenalkan definisi korupsi, tetapi juga membangun kesadaran moral, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi literasi antikorupsi di sekolah dasar, siswa diajak untuk mengenali bentuk-bentuk korupsi serta pentingnya nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan, upaya ini dapat membentuk fondasi nilai sejak usia dini, sehingga anak-anak tumbuh menjadi individu yang memiliki ketahanan moral dan berperan aktif dalam menciptakan budaya antikorupsi di masyarakat.

## **Metode Pelaksanaan**

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar YPPK Salor di Kampung Ivimahad Distrik Kurik Kabupaten Merauke yang diikuti oleh seluruh siswa kelas 5 dan 6 yang berjumlah 35 orang selama satu hari penuh. Kegiatan tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan kegiatan. Tahap pertama adalah observasi yang diawali dengan kegiatan survey, yaitu melakukan analisis awal guna mendapatkan informasi yang akurat dan mendalam serta menyeluruh tentang permasalahan literasi antikorupsi di Sekolah Dasar YPPK Salor Kampung Ivimahad Kabupaten Merauke, kemudian untuk mencari solusi sesuai kebutuhan agar tepat sasaran.

Metode yang digunakan dalam kegiatan penguatan literasi edukasi Antikorupsi ini adalah dengan sosialisasi, edukasi, dan diskusi. Penggunaan metode ini dikarenakan dapat memberikan pengetahuan secara langsung sesuai target dan membuka kesempatan tanya jawab dan interaksi untuk peserta melalui pemutaran video yang sesuai. Sasaran kegiatan ini adalah seluruh siswa kelas 5 dan 6 Sekolah Dasar YPPK Salor di Kampung Ivimahad Kabupaten Merauke.

## Hasil kegiatan

Pelaksanaan program penguatan literasi antikorupsi bagi siswa sekolah dasar di Kampung Ivimahad Kabupaten Merauke menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan sikap siswa terkait perilaku antikorupsi. Secara umum, kegiatan dirancang berbasis metode edukasi partisipatif yang menekankan dialog, permainan edukatif, contoh konkret, dan refleksi nilai. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Lickona (1991) bahwa pendidikan karakter harus mencakup aspek *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action*.

Selain itu, menurut KPK (2020), penguatan literasi antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar harus diberikan melalui pembelajaran yang kontekstual, sederhana, dan dekat dengan pengalaman anak. Seluruh tahapan kegiatan dalam program ini diselaraskan dengan prinsip tersebut sehingga siswa mampu memahami konsep abstrak seperti korupsi melalui pengalaman langsung dan diskusi terbimbing.

### Tahap 1: Sosialisasi Definisi dan Bentuk Korupsi

Tahap pertama merupakan pondasi penting untuk memastikan siswa memahami konsep dasar korupsi. Materi disampaikan menggunakan pendekatan visual berupa gambar situasi sehari-hari, misalnya seseorang mengambil barang tanpa izin, seseorang menerima uang agar memberikan perlakuan khusus, atau seseorang memanipulasi laporan. Media visual terbukti membantu siswa usia 7–12 tahun memahami konsep abstrak (Piaget, 1976).



Gambar 1. Poster Nilai Antikorupsi

Dalam sesi ini, siswa diperkenalkan pada beberapa definisi korupsi yang disederhanakan. Misalnya, korupsi dijelaskan sebagai "tindakan tidak jujur untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menyalahgunakan kepercayaan"—sebuah definisi yang selaras dengan penjelasan Transparency International (2021).

Tim pengabdian kemudian memperkenalkan bentuk-bentuk korupsi seperti:

- a) penyuapan,
- b) penggelapan,
- c) manipulasi data,
- d) penyalahgunaan wewenang.

Namun, istilah tersebut tidak disampaikan sebagai konsep hukum yang rumit, melainkan melalui analogi sederhana. Contohnya, "penggelapan" diibaratkan seperti ketika seseorang diberi tugas menjaga barang kelas, tetapi diam-diam menyimpannya untuk diri sendiri. Pendekatan analogi ini dinilai efektif untuk memperkuat pemahaman siswa pada tahap konkret-operasional.

Interaksi pada tahap ini sangat aktif. Banyak siswa berbagi cerita mengenai pengalaman mereka melihat atau mengalami perilaku tidak jujur. Hal ini menunjukkan bahwa siswa mulai

memahami bahwa kejujuran adalah nilai dasar yang terkait dengan perilaku anti korupsi, sebagaimana ditegaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud, 2019).

### ***Tahap 2: Identifikasi Bentuk Korupsi dalam Lingkup Siswa Sekolah Dasar***

Tahap ini bertujuan membangun kesadaran bahwa perilaku koruptif tidak hanya terjadi pada pejabat negara, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari siswa. Kegiatan dibuka dengan *behavior mapping*, yaitu siswa diminta mencatat dan menyebutkan perilaku tidak jujur yang sering mereka temui.



Gambar 2. Penyampaian materi

Beberapa perilaku yang muncul antara lain:

- a) Menyontek saat ulangan
- b) Menjiplak pekerjaan rumah teman
- c) Tidak mengembalikan barang yang dipinjam
- d) Memalsukan alasan ketika terlambat
- e) Memotong antrean
- f) Menggunakan barang milik kelas tanpa izin
- g) Menyembunyikan kesalahan agar tidak ditegur guru

Setiap perilaku tersebut dianalisis bersama-sama untuk melihat dampak kecil yang mungkin timbul. Misalnya, perilaku menyontek dapat merugikan siswa lain yang belajar dengan jujur, sedangkan memotong antrean dapat menimbulkan rasa tidak adil dan memicu pertengkaran.

Hasil diskusi ini memperkuat temuan Suyanto (2015) yang menyatakan bahwa perilaku koruptif pada anak-anak seringkali muncul dalam bentuk "korupsi kecil" atau *petty cheating*, dan jika tidak dibina dapat berkembang menjadi tindakan menyimpang yang lebih serius di masa dewasa.

Hal yang menarik adalah munculnya kesadaran baru dari siswa bahwa tindakan sederhana seperti memotong antrean ternyata memiliki kesamaan nilai dengan tindakan korupsi, yaitu mengambil hak orang lain. Banyak siswa juga secara spontan menunjukkan rasa malu atau penyesalan ketika menyadari bahwa tindakan tertentu yang mereka anggap wajar ternyata merupakan bibit perilaku koruptif.

### ***Tahap 3: Penjelasan Dampak Korupsi bagi Masyarakat***

Pada tahap ketiga, siswa diajak memahami akibat korupsi dalam lingkup masyarakat luas. Karena konsep ini relatif abstrak bagi siswa sekolah dasar, tim pengabdian menerapkan metode simulasi berbasis permainan (*simulation-based learning*).

Siswa dibagi menjadi kelompok yang memegang kartu sumber daya seperti "uang pembangunan", "buku perpustakaan", "fasilitas umum", dan "obat-obatan". Dalam simulasi pertama, seluruh sumber daya dipakai sesuai peruntukannya, menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, aman, dan sejahtera. Dalam simulasi kedua, seorang siswa memainkan peran sebagai "pejabat yang korup", yang mengambil sebagian sumber daya untuk keperluan pribadi. Simulasi ini menghasilkan

kondisi sebaliknya: jalan tidak diperbaiki, fasilitas umum menjadi rusak, dan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Simulasi ini terbukti efektif membuat siswa memahami bahwa korupsi menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Rose-Ackerman (2017) bahwa korupsi dapat menimbulkan ketidakadilan struktural, melemahkan kepercayaan publik, dan menghambat pembangunan.

Diskusi setelah simulasi menunjukkan bahwa siswa mulai menghubungkan tindakan korupsi dengan ketidakadilan sosial. Mereka mulai menyadari bahwa korupsi bukan hanya merugikan negara secara abstrak, tetapi juga mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung, termasuk keluarga mereka.

#### ***Tahap 4: Penjelasan Dampak Korupsi terhadap Pendidikan***

Tahap ini berfokus pada dunia pendidikan sebagai konteks terdekat siswa. Materi disampaikan dengan menampilkan gambar-gambar sekolah rusak, perpustakaan dengan koleksi minim, dan ruang kelas yang kekurangan meja dan kursi. Setiap gambar dikaitkan dengan kemungkinan bahwa dana sekolah disalahgunakan sehingga fasilitas tidak dapat diperbaiki.

Menurut laporan KPK (2021), korupsi dalam sektor pendidikan memiliki dampak jangka panjang karena dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia yang merupakan pilar pembangunan. Penjelasan ini kemudian diadaptasi menjadi narasi sederhana bagi siswa, seperti "Kalau uang sekolah dipakai untuk hal lain, kita tidak bisa mendapatkan buku baru atau meja yang lebih baik."

Pada sesi diskusi, siswa menunjukkan empati dan kesadaran bahwa perilaku tidak jujur—baik oleh orang dewasa maupun oleh diri mereka sendiri—dapat mengurangi kesempatan belajar. Misalnya, ketidakjujuran dalam bentuk menyontek dapat membuat siswa tidak memahami pelajaran, sehingga berpengaruh pada masa depan mereka.

Tahap ini memperlihatkan bahwa siswa mulai memahami bahwa nilai kejujuran adalah bagian penting dari kualitas pembelajaran dan masa depan mereka. Guru-guru yang hadir dalam kegiatan juga memberikan umpan balik bahwa pendekatan edukatif yang digunakan mudah dipahami dan bermanfaat untuk pembinaan karakter siswa.

#### ***Tahap 5: Diskusi Interaktif dan Refleksi Siswa***

Tahap terakhir merupakan ruang bagi siswa untuk merumuskan pemahaman dan nilai yang diperoleh. Siswa diminta untuk menuliskan:

- a) Apa yang mereka pelajari tentang korupsi
- b) Perilaku tidak jujur apa yang ingin mereka hentikan
- c) Komitmen apa yang akan mereka lakukan untuk menjadi siswa berintegritas.

Respons siswa sangat beragam dan menunjukkan kedewasaan pemahaman, misalnya: "*Saya tidak akan menyontek lagi karena itu merugikan diri sendiri dan teman-teman*"; "*Saya tidak akan membantah lagi jika disuruh orang tua*"; "*Saya akan menjaga barang-barang di kelas dan tidak mengambil tanpa izin*"; "*saya tidak akan datang terlambat lagi*".





Gambar 3. Diskusi dan Refleksi

Pemahaman siswa tentang antikorupsi sangat penting karena menjadi dasar dalam membentuk karakter yang berintegritas sejak usia dini. Ketika siswa memahami bahwa korupsi tidak hanya berkaitan dengan tindakan besar seperti penyalahgunaan uang negara, tetapi juga mencakup perilaku sehari-hari seperti ketidakjujuran atau penyalahgunaan kepercayaan, mereka akan lebih peka dalam membedakan mana yang benar dan salah. Pengetahuan ini membantu menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, serta sikap adil dalam setiap tindakan.

Selain itu, pemahaman antikorupsi mendorong siswa untuk melihat dampak nyata korupsi terhadap masyarakat, seperti terhambatnya pembangunan, berkurangnya kualitas layanan publik, dan munculnya ketidaksetaraan. Kesadaran tersebut dapat menumbuhkan rasa empati dan kepedulian sosial sehingga siswa terdorong untuk ikut menjaga lingkungan yang bebas dari korupsi. Pendidikan antikorupsi juga memperkuat budaya disiplin dan keterbukaan, yang kelak menjadi bekal penting saat mereka memasuki dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pembelajaran antikorupsi tidak hanya membentuk perilaku positif sekarang, tetapi juga mempersiapkan generasi yang berintegritas untuk masa depan.



Gambar 4. Foto bersama

## Kesimpulan

Kegiatan penguatan literasi anti korupsi bagi siswa sekolah dasar di Kampung Ivimahad Kabupaten Merauke memberikan dampak positif dalam peningkatan pemahaman, kesadaran, dan perilaku siswa terkait nilai-nilai anti korupsi. Melalui lima tahapan sosialisasi yang dirancang secara sistematis—mulai dari pengenalan definisi korupsi, identifikasi perilaku koruptif dalam lingkungan sekolah, hingga pemahaman dampak korupsi bagi masyarakat dan pendidikan—siswa memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pentingnya kejujuran dan integritas dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan edukasi partisipatif yang digunakan terbukti efektif, dibuktikan melalui interaksi aktif siswa, kemampuan mereka mengidentifikasi perilaku tidak jujur, serta munculnya sikap reflektif yang ditunjukkan dalam sesi diskusi akhir. Permainan simulasi, contoh visual, dan narasi berbasis pengalaman nyata juga berperan signifikan dalam membantu siswa memahami konsep abstrak seperti korupsi.

Selain meningkatkan aspek *moral knowing*, kegiatan ini juga memperkuat *moral feeling* dan *moral action*, terlihat dari perubahan perilaku siswa yang lebih tertib, jujur, dan sadar terhadap konsekuensi tindakan mereka. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi sejak usia dini merupakan upaya strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang berintegritas, sebagaimana direkomendasikan oleh berbagai lembaga pendidikan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

## Daftar Rujukan

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). Panduan pendidikan karakter: Integritas dan anti korupsi pada jenjang sekolah dasar. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). Modul pendidikan antikorupsi untuk sekolah dasar. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, KPK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). Laporan tahunan KPK 2021: Pendidikan, pencegahan, dan pemberantasan korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Lickona, T. (1991). Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility. New York, NY: Bantam Books.
- Nucci, L. (2018). Character development and education: Building moral and civic responsibility. New York, NY: Routledge.
- Piaget, J. (1976). The child's conception of the world. Totowa, NJ: Littlefield, Adams & Co.
- Rose-Ackerman, S. (2017). Corruption and government: Causes, consequences, and reform (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Suyanto, B. (2015). Masalah sosial: Dampak dan dinamika dalam kehidupan anak. Jakarta: Kencana.
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. <https://www.transparency.org/en/publications/corruption-perceptions-index-2023>
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie. (2009). Korupsi mengorupsi Indonesia : sebab, akibat, dan prospek pemberantasan. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.